



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2025
 Reviewed : 02/04/2025
 Accepted : 04/04/2025
 Published : 17/04/2025

Ayu Tri Chahyani¹
 Hanaya Manuela
 Ambarita²
 Nabila Devia
 Hummaira³
 Iwidy Risti Sinaga⁴
 Mikha Valdo
 Tambunan⁵
 Jamaludin⁶
 Sri Yunita⁷

EVALUASI DAMPAK KEKURANGAN GURU MATA PELAJARAN PANCASILA DI SMP NEGERI 5 PERCUT SEI TUAN

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi dampak kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai kebangsaan sekaligus karakter siswa. Namun, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa kurangnya guru dapat berdampak pada efektivitas pembelajaran, di mana guru dari mata pelajaran lain harus menggantikan peran guru PPKn, meskipun dengan pemahaman yang terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila agar dapat mencetak generasi muda yang nasionalis dan berkarakter.

Kata Kunci: Karakter Siswa, Kekurangan Guru, Pendidikan Pancasila, SMP.

Abstract

This study evaluates the impact of the shortage of Pancasila subject teachers at SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. Pancasila is the basis of the state that has an important role in fostering national values as well as student character. However, the shortage of competent educators in this field has the potential to reduce the quality of learning and students' understanding of Pancasila values. In this study, descriptive qualitative method was used with data collection techniques through observation, interview, and documentation. This study found that the shortage of teachers can have an impact on the effectiveness of learning, where teachers from other subjects must replace the role of Civics teachers, albeit with limited understanding. This condition affects the internalization of Pancasila values among students. Therefore, a collaborative solution is needed between the government, schools and the community to overcome the shortage of teachers and improve the quality of Pancasila education in order to produce a young generation with nationalism and character.

Keywords: Student character, teacher shortcomings, Pancasila education, junior high school.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam artian luas merupakan hidup. Artinya, pendidikan adalah segala ilmu pengetahuan yang berlangsung sepanjang masa di segala tempat dan keadaan yang memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan setiap individu. Pendidikan berlangsung sepanjang masa (*education lasts throughout the lifespan*). Pendidikan dalam artian sempit adalah sekolah.

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Medan Pembangunan Panca Budi

email: ayutrichahyani809@gmail.com¹, hanayamanuelaambarita@gmail.com², nabiladeviahumaira@gmail.com³, iwidyaristi265@gmail.com⁴, valdotambunan101005@gmail.com⁵

Sistem ini wajib bagi orang yang memiliki status sebagai peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa di sebuah universitas (lembaga pendidikan formal). Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan yang mempunyai pedoman terkenal yaitu, 'Ing Ngarso Sung Tulodo' (di depan memberi teladan), 'Ing Madyo Mangun Karso' (di tengah membangun dan mendorong), Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan). Pendidikan adalah segala keefektifan yang coba diberikan oleh sebuah institusi kepada para pelajar dengan harapan agar mereka memiliki kompetensi yang baik dan kesadaran penuh akan ikatan dan masalah sosial mereka (Pristiwanti, et al., 2022).

Sebagai dasar negara Bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi mendatang. Pancasila tidak hanya sekadar kata-kata melainkan dasar yang sangat penting untuk menghasilkan warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang kuat. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan (Nurwardani, et al., 2016). Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam pengajaran Pancasila untuk membentuk karakter generasi muda agar menjadi pribadi yang berintegritas dan memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Undang-Undang yang sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan Sistem Pendidikan Nasional merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar disemua jalur dan jenjang Pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *Civic Education* juga selayaknya ditujukan kepada setiap warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama (Nissa et al., 2024).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran penting untuk diajarkan karena memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran berbangsa serta bernegara di kalangan siswa (Wardana et al., 2024). Dalam sistem pendidikan di Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Pancasila juga memegang peran penting dalam membentuk nilai-nilai kebangsaan, moral, serta kesadaran bernegara bagi siswa. Namun, tantangan besar yang kini dihadapi adalah kurangnya jumlah guru yang menguasai mata pelajaran ini. Kekurangan guru Pancasila tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran di kelas, tetapi juga mempengaruhi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tanpa pengajar yang cukup, ada risiko besar bahwa materi yang seharusnya ditanamkan dengan baik justru menjadi kurang maksimal dalam penyampaiannya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan, mengingat Pancasila adalah dasar ideologi negara yang harus dipahami oleh setiap warga negara sejak dini. (Siallagan, et al., 2023).

Selanjutnya, dalam beberapa tahun kebelakang terdapat fenomena maraknya guru non-lulusan PPKn yang mengajar mata pelajaran ini. Masalah ini dapat muncul dari beberapa faktor, salah satunya yaitu kekurangan guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki kualitas serta benar-benar lulusan PPKn, kebijakan dalam rekrutmen guru yang seenaknya, serta tidak meratanya guru PPKn di Indonesia (Wardana et al., 2024). Guru merupakan figur sentral dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, karena guru memiliki peran fungsi dan kedudukan dalam keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa adanya guru, tidak akan bisa mendidik anak secara maksimal untuk menjadi generasi muda yang berpendidikan. Lebih jauh lagi, guru adalah orang yang selalu bersentuhan langsung dengan para siswa sehingga memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendidik para siswa agar mereka menjadi generasi yang terdidik berakhlak mulia dan mencintai budaya Indonesia (Muspawi, 2021).

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran diperlukan tenaga pendidik yang cakap, bertanggung jawab, berpengalaman dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi terhadap pendidikan. Kecakapan tenaga pendidik merupakan faktor penentu yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian kualitas pembelajaran. Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu menciptakan pembelajaran menjadi lebih efektif, kreatif dan inovatif (Napisah, 2023). Kekurangan guru yang memahami nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan kualitas

pendidikan rendah dan pemahaman siswa tentang dasar ideologi negara. Siswa tidak menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan akibat pengajaran Pancasila yang kurang tersampaikan karena pendidikan sejatinya untuk membantu manusia menumbuhkan kecerdasan dan pintar (*smart*) sekaligus menjadi manusia yang baik/berakhlak (*good*) (Muchtarom, Winarno, & Suryono, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter yang diamanatkan dalam sistem pendidikan nasional sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengajarkan Pancasila.

Pada jurnal (Nababan, Pasaribu, Jamaludin, & Yunita, 2023) membahas pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat menjadi solusi efektif bagi permasalahan pendidikan. Ketika sekolah menghadapi keterbatasan tenaga pengajar PPKn, implementasi media pembelajaran interaktif dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran, contohnya adalah aplikasi Media Quizizz. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan Quizizz tidak hanya meningkatkan minat dan partisipasi siswa, tetapi juga memfasilitasi evaluasi pemahaman materi secara efisien. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal, "Media Quizizz memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran," sehingga dapat membantu mengatasi tantangan keterbatasan guru dengan memungkinkan pembelajaran yang lebih mandiri dan interaktif.

Di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, kondisi kekurangan guru mata pelajaran Pancasila menjadi salah satu permasalahan yang krusial karena hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten mengakibatkan tidak optimalnya penyampaian materi, sehingga siswa berpotensi mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dimasyarakat. Rendahnya kualitas pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah menengah berkontribusi terhadap lemahnya karakter kebangsaan di kalangan pelajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai dampak dari kekurangan guru Pancasila di sekolah ini, agar dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Setelah mengetahui permasalahan ini, penulis memutuskan untuk mempertimbangkan masalah ini untuk diteliti lebih lanjut. Solusi yang cepat harus dibuat dengan bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Meningkatkan kualitas pendidikan tidak dapat dicapai secara instan tetapi semuanya itu memerlukan upaya berkelanjutan dan kerja sama dari berbagai komponen (Tilaar, 2007). Sekolah harus mengembangkan pendekatan kreatif untuk mengatasi kekurangan guru. Di sisi lain, pemerintah dan organisasi pendidikan harus memberikan perhatian lebih besar pada distribusi dan peningkatan kompetensi Guru Pancasila. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pendidikan Pancasila tetap berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan generasi muda yang nasionalis, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengevaluasi secara mendalam dampak dari kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang akurat, sehingga dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Dengan menyadari hal ini, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara instan. Perlukan kerja sama antar pihak, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat luas, untuk membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara mendalam dengan berfokus pada makna yang terkandung di dalamnya, bukan sekadar angka atau generalisasi. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan bersifat deskriptif, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan suatu kejadian, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai alasan, proses, serta dampak dari fenomena

yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di berbagai bidang (Abdussamad, 2021).

Metode penelitian ini untuk mengevaluasi dampak kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. Populasi penelitian mencakup seluruh guru, siswa, dan kepala sekolah di sekolah tersebut, sementara sampel yang diambil terdiri dari seluruh guru mata pelajaran Pancasila, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah. Instrumen penelitian seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi dikembangkan untuk memastikan pengumpulan data yang sistematis dan informatif. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera, perekam suara, dan laptop, sedangkan bahan terdiri dari lembar observasi, pedoman wawancara, dan alat tulis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak kekurangan guru Pancasila dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter serta kecerdasan generasi penerus bangsa. Di dalamnya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi hal penting dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menanamkan nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. PPKn tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teori tentang sistem ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta hukum yang berlaku, tetapi juga untuk membentuk sikap dan moral peserta didik agar mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai untuk mengajarkan mata pelajaran ini secara optimal. Kekurangan guru yang memiliki latar belakang akademik di bidang PPKn menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, karena dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran serta pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak yang perlu dicermati lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, kekurangan Guru PPKn menyebabkan pihak sekolah harus mengambil langkah alternatif, seperti menugaskan guru dari mata pelajaran lain yang memiliki keterkaitan dengan PPKn, dalam kasus ini seperti Guru Agama atau Guru Bimbingan Konseling (BK), untuk mengisi kekosongan tersebut. Meskipun pendekatan ini dapat menjadi solusi sementara, tetap ada kendala dalam penerapannya, terutama dalam hal kompetensi dan pemahaman yang mendalam mengenai materi PPKn. Hal ini berpotensi membuat pembelajaran menjadi kurang maksimal, sehingga siswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan yang seharusnya mereka kuasai.

Kepala Sekolah sebagai Narasumber *Pertama* mengatakan bahwa tidak ada tantangan yang besar yang dihadapi oleh sekolah dalam mengatasi kekurangan guru PPKn di sini karena semua masih bisa dikendalikan. *"Guru PKN di sini ada dua, satu Guru PKN-nya baru pensiun pada tahun 2024 kemarin dan satu lagi masih mengajar di sini"*. guru yang telah pensiun digantikan oleh Guru Agama karena mata pelajaran Agama masih berhubungan dengan Pancasila. *"Lagian jam Guru Agamanya kurang di sini jadi dia bisa ditambah dengan mengajar mata pelajaran PKN"* ujar kepala sekolah. Narasumber juga menyampaikan mengenai dampak kekurangan guru ini kepada siswa dalam memahami pembelajaran PKN secara teori memang berdampak namun dalam pengimplementasiannya tidak karena di SMP yang ditekankan adalah pendidikan karakter, etika dan moral. *"Mengetahui kekurangan guru semua teratasi di sini hanya saja Guru PKN di sini digantikan oleh guru mata pelajaran lain seperti guru BK"*. Dipilihnya Guru BK untuk menggantikan Guru PKN di sini karena BK masih berhubungan dan sejalan dengan kepribadian anak dan Guru Agama juga demikian. Selanjutnya, Narasumber berharap pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan ini *"mengenai kurangnya Guru PKN di sini kami hanya bisa menunggu dari pusat untuk ditempatkan guru baru di sini dan kami pasti akan menerimanya"*. Dalam mengatasi hal ini, untuk sementara waktu melalui Kepala Sekolah diarahkan guru yang berhubungan dengan Pendidikan Pancasila untuk menggantikan mata pelajaran PKN sementara waktu. Mengenai efektifnya atau tidak mata pelajaran PKN di sini

yang perlu ditingkatkan adalah P4 seperti dulu di mana tanggung jawab dan rasa hormat sangat dipentingkan dan kepala sekolah berharap P4 tentang pembentukan moral anak-anak dapat dimasukkan ke dalam pelajaran bukan hanya Pancasila saja. Harapan Kepala Sekolah kepada Pemerintah adalah supaya Pemerintah dapat menambahkan guru di Sekolah tersebut sesuai mata pelajarannya supaya dapat berjalan lebih relevan dan sejalan agar yang masuk ke dalam kelas untuk memberi pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Kepada siswa kepala sekolah tetap memberikan semangat dan motivasi agar mereka tetap dapat semangat untuk tetap mengikuti pelajaran PKN.

Kepada Narasumber *Kedua* selaku Guru PPKn di Sekolah tersebut yang telah mengajar selama 18 Tahun sejak Tahun 2008-Sekarang. Dari waktu ke waktu dan tahun ke tahun Narasumber mengajar, hanya Narasumber *Kedua* yang bertahan hingga sekarang di Sekolah tersebut. Maka hanya ada Satu guru PPKn di Sekolah tersebut. Menurut Narasumber, kondisi jumlah guru PPKn di sekolah tersebut cukup memprihatinkan karena mengalami kekurangan jumlah guru PPKn selama ia mengajar serta kurangnya jumlah guru PPKn jika dibandingkan dengan kelas yang cukup banyak (24 rombongan belajar), maka sebagian kelas akan digantikan guru pengganti yaitu Guru Agama dan Guru BK yang mana kedua guru tersebut kekurangan jam pelajaran. Dalam masalah pemahaman siswa saat guru pengganti mengajar, Narasumber *kedua* mengatakan *"menurut Saya guru pengganti Agama dan guru BK kurang efektif karena mereka hanya mengetahui hal-hal umum seperti hanya menjelaskan bagaimana Pancasila dan Kewarganegaraan secara garis besar, untuk hal-hal yang lebih detail contohnya pada materi tentang genosida dan pembuatan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, guru pengganti tidak menguasai secara penuh materi tersebut"*. Hal ini memiliki dampak sangat besar karena pastinya merugikan sekolah terutama Siswa/i sebagai pelajar. Jika guru pengganti tidak memiliki dasar sebagai guru PPKn maka pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan berjalan efektif, maka pemahaman siswa terhadap pengajaran guru pengganti PPKn kurang maksimal karena memang bukan keahliannya. Hal ini juga berdampak pada *jobdesk* guru PPKn tersebut yang mana Narasumber sering terbentur dalam pembuatan soal sehingga soal yang dibuat adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Narasumber juga menambahkan bahwa alasan kenapa Ia harus membuat soal ujian dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, sebab sebagian kelas yang diajarkan oleh guru pengganti, Siswa/i kurang menguasai atau memahami materi mata pelajaran PPKn. Narasumber *kedua* juga sangat menyayangkan karakter siswa/i saat ini kurang mencerminkan pengamalan Pancasila. Sebagai contoh, Narasumber *kedua* selaku guru PPKn mengatakan *"dalam berkomunikasi saja di lingkungan Sekolah Siswa/i tidak segan untuk berkata kasar pada sesama temannya, namun Saya sebagai guru PPKn serta guru pengganti akan terus berusaha memperbaiki karakter siswa tetapi hasil akhirnya akan ditentukan Siswa itu sendiri apakah Mereka ingin berubah atau tidak"*. Narasumber juga memberikan saran untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran Pancasila ditengah situasi kekurangan guru PPKn *"Saya berharap kepada pemerintahan pusat yaitu Kemendikbud dapat menempatkan Guru PPKn tambahan ke Sekolah ini"*.

Narasumber *ketiga* yaitu Guru pengganti Mata Pelajaran Pancasila di Sekolah tersebut yang peran sebenarnya adalah sebagai Guru BK (Bimbingan Konseling). Narasumber *Ketiga* telah menjalankan tugas sebagai guru pengganti mata pelajaran Pancasila selama T.A 2024/2025 (Satu Tahun) disebabkan oleh Guru Pancasila sebelumnya telah pensiun. Narasumber *Ke-Tiga* mengakui PKN dan BK saling berkaitan *"apalagi memang BK dengan PKN sedikit berhubungan tentang perilaku, moral, dan mengajarkan supaya anak itu bermoral dan berakarakter, karena PKN kan arahnya kesitu"*. Kemudian dikarnakan Pancasila bukanlah bidang ilmu sebenarnya Narasumber tidak terlalu memahaminya lebih dalam *"kalau secara khusus tidak terlalu, tetapi secara umum masih ada"*. Sebagai bahan ajar di kelasnya Narasumber *Ketiga* mendapatkan dari Buku Ajar Ppkn dan Internet *"supaya lebih banyak lagi dari google atau media sosial lain kan juga sudah banyak agar lebih bervariasi juga anak-anak lebih paham"*. Narasumber *Ketiga* mengakui, tidak terlalu kesulitan dalam melaksanakan tugas ini dan berusaha terus belajar demi yang terbaik untuk Siswanya *"Namanya guru semua harus bisa"* Paparnya. Menurut pandangan Narasumber *Ketiga* Siswa di kelasnya senang melakukan pembelajaran PKN bersamanya. *"Pada dasarnya anak itu kan ada yang senang PKN, ada yang*

senang Matematika, dan sebagainya. Tapi, pada dasarnya respon anak pada Mata Pelajaran PKN 100% Bagus, Senang”. Terakhir, Narasumber Ketiga berharap selanjutnya yang mengajar di Sekolahnya memang berasal dari Jurusan PKN karena sesungguhnya Guru PKN pasti akan lebih mempunyai dan lebih mendalam pemahamannya untuk mengajarkan materi kepada Siswa dibanding Narasumber sendiri yang merupakan Guru BK.

Tulisan ini berupaya mengangkat berbagai sudut pandang dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam situasi ini, mulai dari kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kebijakan di lingkungan sekolah, Guru PPKn yang masih bertugas dan merasakan langsung dampak dari kekurangan tenaga pengajar, hingga guru pengganti yang diberikan tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran ini meskipun bukan dari bidang keahliannya. Narasumber Kedua, yang merupakan satu-satunya guru PPKn di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan dengan pengalaman mengajar selama 18 tahun, menunjukkan bahwa kondisi kekurangan guru PPKn di sekolah tersebut cukup memprihatinkan, terutama dengan 24 rombongan belajar yang harus ditangani hanya oleh satu guru. Hal ini dapat diperiksa melalui data kepegawaian dan riwayat pengajaran di sekolah. Narasumber juga mengungkapkan bahwa guru pengganti, yang berasal dari bidang lain, kurang efektif dalam mengajar PPKn, hanya mampu menjelaskan materi secara umum, yang dapat diverifikasi melalui observasi dan wawancara dengan siswa mengenai pemahaman mereka terhadap materi.

Selain itu, Narasumber mencatat bahwa karakter siswa tidak mencerminkan pengamalan Pancasila, yang dapat dibuktikan melalui observasi perilaku siswa di sekolah. Narasumber ketiga, yang merupakan guru pengganti PPKn yang peran sebenarnya sebagai guru BK, mengakui adanya hubungan antara PKN dan BK, serta menggunakan Buku Ajar dan sumber dari Internet untuk mengajar. Verifikasi terhadap pernyataan ini dapat dilakukan dengan memeriksa materi pembelajaran yang digunakan dan mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka. Narasumber ketiga juga berharap agar guru PPKn di Sekolahnya berasal dari jurusan PKN untuk pemahaman yang lebih mendalam, yang dapat diuji dengan melihat jam terbang pendidikan dan pengalaman mengajar guru-guru yang ada. Perbedaan persepsi ini menunjukkan kompleksitas permasalahan dan perlunya pendekatan yang holistik untuk menemukan solusi yang efektif. Solusi tersebut harus mempertimbangkan aspek kuantitatif (penambahan guru PPKn) dan kualitatif (peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter).

Untuk mengatasi kekurangan guru Pancasila diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan kolaborasi multipihak. Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kuota penerimaan guru PNS dan menyediakan beasiswa bagi calon guru PPKn. Sekolah dapat mengatasi kekurangan sementara dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendatangkan pengajar tamu. Selain itu, peningkatan kualitas pembelajaran sangat krusial, dimana guru perlu pelatihan berkelanjutan dan penerapan metode pengajaran inovatif, sementara sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung nilai-nilai Pancasila.

Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran vital. Orang tua harus menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila di rumah, sementara masyarakat dapat mendukung kegiatan sekolah dan menjadi agen pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Sangat penting bahwa pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat bekerja sama dengan baik. Forum komunikasi yang melibatkan semua pihak dapat memfasilitasi diskusi dan perencanaan strategi yang komprehensif untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran Pancasila. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan sekolah dapat mengatasi kekurangan guru Pancasila dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga tercipta generasi muda yang berkarakter dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya, serta kepada para penulis dan peneliti yang karya-karyanya menjadi

referensi utama dalam penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai Pancasila. Minimnya tenaga pendidik yang berlatar belakang akademik di bidang PPKn menyebabkan sekolah harus menugaskan guru dari bidang lain sebagai pengganti. Hal ini mengakibatkan penyampaian materi menjadi kurang optimal dan berpotensi menurunkan efektivitas internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan siswa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Pemerintah perlu menambah jumlah guru PPKn dengan distribusi yang lebih merata, sementara sekolah dapat mengoptimalkan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Selain itu, penguatan pendidikan karakter disekolah dan keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara pada siswa. Dengan bekerja sama dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan kekurangan guru Pancasila dapat teratasi, sehingga pendidikan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In H. Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 224). Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Muspawi, M. (2021). Strategi peningkatan kinerja guru. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 101-106.
- Muchtarom, M., Winarno, & Suryono, H. (2019). Implementasi penguatan pendidikan karakter untuk mengembangkan kecerdasan moral di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 47 – 61.
- Nababan, C., Pasaribu, A., Jamaludin, & Yunita, S. (2023). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn Siswa. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(4), 106-114. doi:<https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.678>
- Napisah, S. S., & Rasmitadila. (2023). Pengaruh Rendahnya Kualitas Tenaga Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran. *Karimah Tauhid*, 2(5), 2154–2163.
- Nissa, S. M., Hasibuan, M. A., & Fadhilah, A. (2024). Kelemahan di Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 8, 25780–25789.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kuswanjono, A., Munir, M., Mustansyir, R., Nurdin, E. S., Festanto, A. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Dan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.
- Siallagan, A. P., Sitohang, A. T., Hutapea, D. J., Marpaung, R., Tobing, S. R., Simbolon, T. G., & Jamaludin. (2023). Problematika Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum Merdeka di SMAN 7 Medan. *Jurnal Profesi Keguruan (JPK)*, 9(3), 195-207. Diambil kembali dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpk>
- Tilaar, H. A. (2007). *Manajemen pendidikan nasional: kajian pendidikan masa depan*. California: Remaja Rosdakarya.
- Wardana, A. Y., Syaifullah, & Insani, N. N. (2024). Analisis Maraknya Guru Non-Lulusan Ppkn Mengajar Mata Pelajaran Ppkn. *Jurnal LingkarPembelajaran Inovatif*, 5, 85–88.